



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi Publik BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi kami dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kebijakan, pelaksanaan, serta tantangan dan upaya peningkatan pelayanan informasi publik di BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Di era digital yang semakin dinamis, keterbukaan informasi publik menjadi landasan penting dalam menciptakan pemerintahan yang inklusif dan partisipatif.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik masih terdapat berbagai kendala yang membutuhkan perhatian dan perbaikan. Oleh karena itu, laporan ini juga memuat rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik ke depannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Selain itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan pelayanan kami.

Semarang, 2 Januari 2025

KEPALA BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH

selaku

Atasan PPID

BPKAD

**SLAMET, AK**

Pembina Utama Madya

NIP: 196602151986031001

## DAFTAR ISI

<b>BAB I : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 .....</b>	<b>3</b>
A. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....	3
B. Sumber Daya Manusia .....	6
C. Anggaran .....	7
<b>BAB III : RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 .....</b>	<b>9</b>
A. Kegiatan yang Telah Dilaksanakan .....	9
B. Jumlah Pemohon Informasi Publik .....	12
C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik .....	13
D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak.....	16
<b>BAB IV : KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB V : REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT .....</b>	<b>20</b>

## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK**

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Di era digital saat ini, kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat dan transparan semakin meningkat. Terlebih, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi. Terdapat beberapa alasan mengapa keterbukaan informasi publik menjadi sangat penting, salah satunya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Di era digital, masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk memantau kinerja pemerintah. Keterbukaan informasi memungkinkan publik mengetahui proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program pemerintah. Hal ini mendorong pemerintah untuk bertindak secara transparan dan bertanggung jawab.

Penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Di era digital, akses informasi yang terbuka membantu mengurangi kecurigaan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Selain itu, dengan kemudahan akses informasi melalui teknologi digital, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan. Informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat memberikan masukan, kritik, atau saran yang konstruktif untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi. Era digital memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk memenuhi hak ini melalui berbagai platform, seperti website resmi, aplikasi, dan media sosial. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi
2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka BPKAD Provinsi Jawa Tengah telah mengimplementasikan amanat UU tersebut dengan membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Bagi BPKAD, keterbukaan informasi menjadi langkah strategis untuk memastikan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan inklusif.

## BAB II

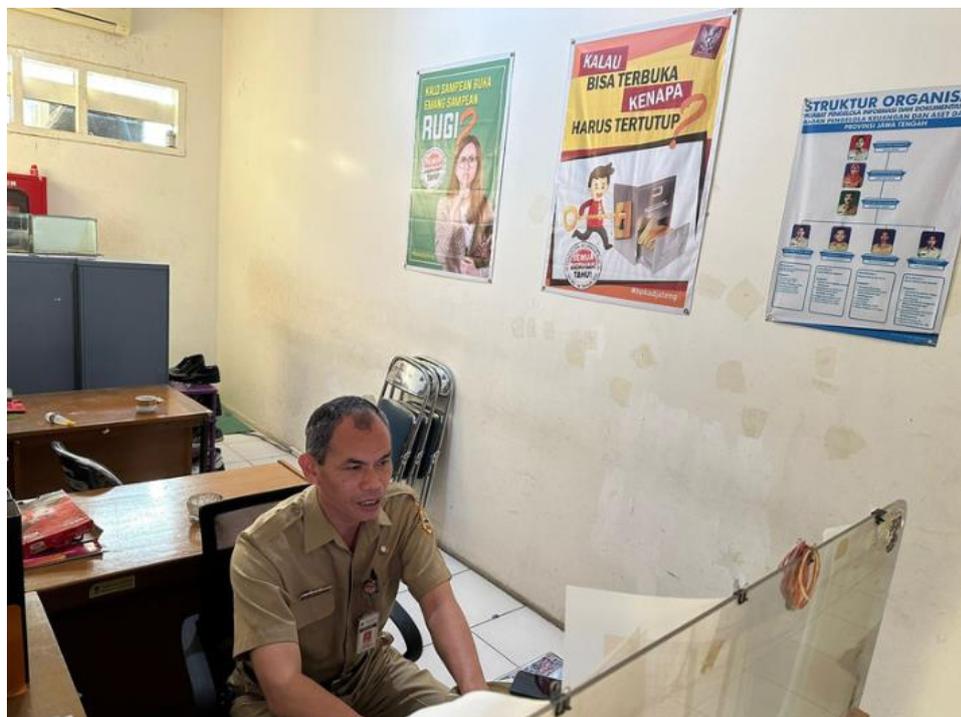
### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

#### A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi elemen fundamental yang memastikan pelayanan dapat berjalan secara efektif. Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik yang optimal, BPKAD Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut :

##### 1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Ruangan ini merupakan ruang khusus yang disediakan untuk melayani permintaan informasi oleh masyarakat yang dilakukan secara *offline*. Disertai dengan meja layanan dan tempat duduk, komputer dan perangkat akses informasi serta petugas PPID yang siap melayani pemohon informasi yang datang ke BPKAD Provinsi Jawa Tengah.



**Petugas Layanan di Ruang PPID**

Kondisi ruang pelayanan informasi publik di BPKAD Provinsi Jawa Tengah saat ini memang belum memadai mengingat saat ini BPKAD Provinsi Jawa Tengah masih menempati gedung sementara dikarenakan kantor BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang sedang di renovasi. Namun, sebagai upaya mendukung keterbukaan informasi, BPKAD terus meningkatkan kualitas fasilitas yang tersedia, baik dari segi kelengkapan fisik maupun integrasi layanan digital.

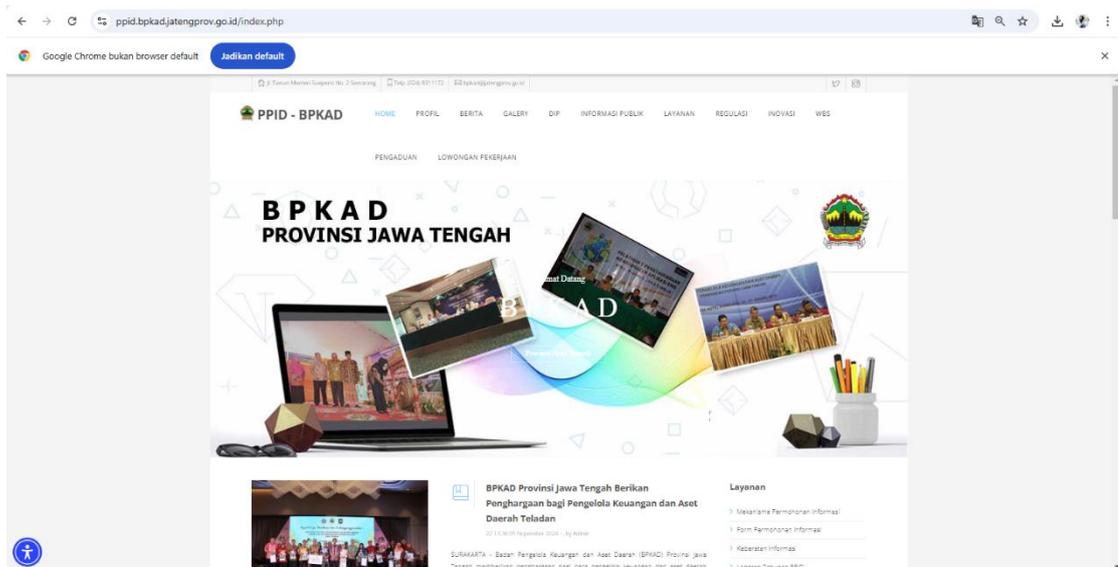
## 2. Website Resmi PPID

BPKAD Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 website yang dapat diakses oleh publik yaitu website utama BPKAD di tautan <https://bpkad.jatengprov.go.id/> dan website PPID di tautan <https://ppid.bpkad.jatengprov.go.id/>.

Website tersebut menyediakan beberapa informasi seperti Daftar Informasi Publik (DIP), prosedur permohonan informasi, informasi badan publik, anggaran dan program kerja serta informasi lain sesuai tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah.



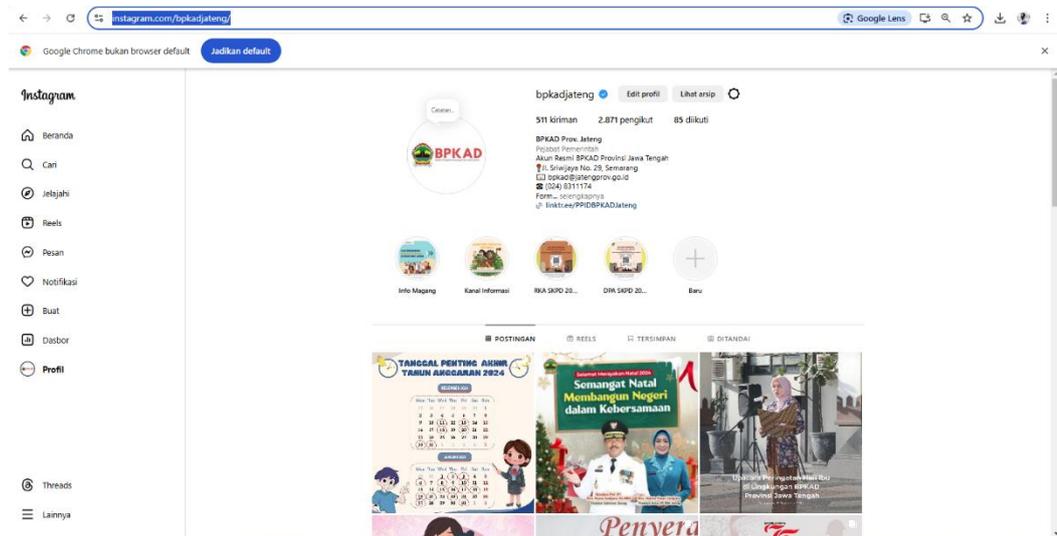
**Website BPKAD Provinsi Jawa Tengah**



## Website PPID BPKAD Provinsi Jawa Tengah

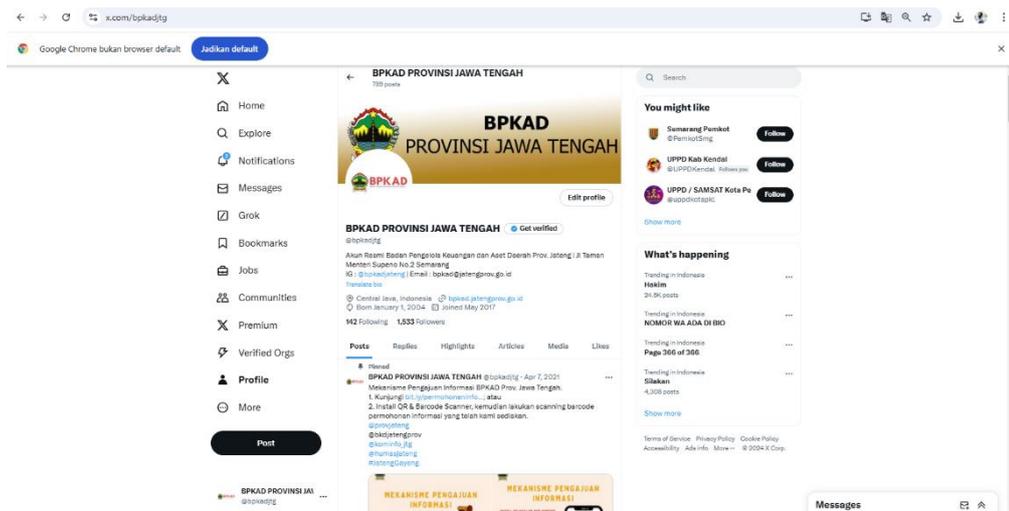
### 3. Media Sosial Resmi BPKAD

BPKAD Provinsi Jawa Tengah memiliki 3 media sosial aktif yang digunakan untuk menyebarkan informasi secara realtime. Media sosial ini digunakan untuk memastikan keterjangkauan informasi, khususnya bagi masyarakat yang lebih akrab dengan media sosial.

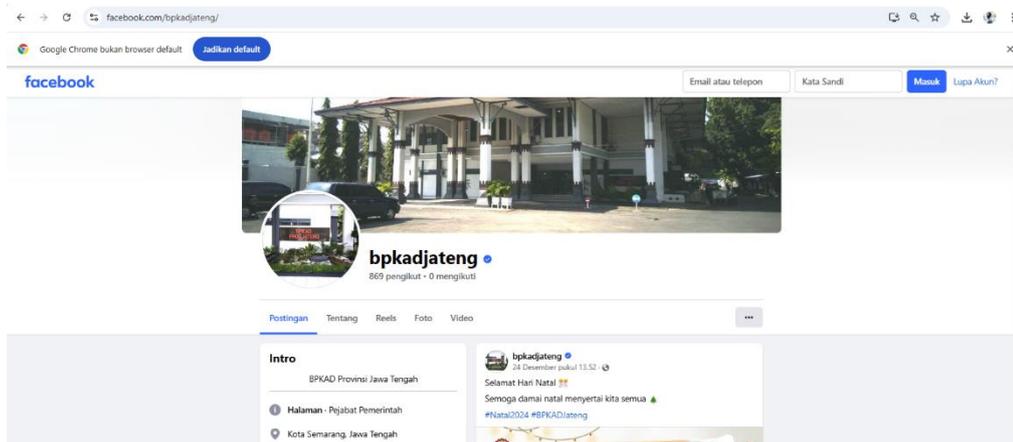


Akun resmi Instagram @bpkad Jateng

<https://www.instagram.com/bpkad Jateng/>



**Akun resmi X @bpkadjtg <https://x.com/bpkadjtg>**



**Akun resmi facebook Bpkad Jateng**  
**<https://www.facebook.com/bpkadjateng/>**

## **B. Sumber Daya Manusia**

Pelayanan informasi publik yang optimal tidak hanya bergantung pada sarana dan prasarana, tetapi juga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas, SDM yang kompeten, profesional dan memahami prinsip keterbukaan informasi publik. BPKAD Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan SDM yang khusus menangani pelayanan informasi publik melalui struktur organisasi yang mendukung fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pelayanan informasi publik pada PPID BPKAD Provinsi Jawa Tengah merujuk pada Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800/166 tanggal 29 Januari 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pejabat PPID pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah meliputi :

1. Atasan PPID
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Bidang Pengelola Informasi
5. Bidang Layanan Informasi
6. Bidang Pengembangan, Dokumentasi dan Arsip
7. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Dengan didukung oleh SDM yang kompeten dan berintegritas, BPKAD Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik yang profesional, transparan, dan responsif. Hal ini bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

### **C. Anggaran**

BPKAD Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran yang memadai demi mendukung keterbukaan informasi publik. Dengan dukungan anggaran yang terencana dan transparan, diharapkan pelayanan informasi publik dapat berjalan secara maksimal, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan terkait PPID di BPKAD Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD Provinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2024.

Adapun anggaran untuk pelayanan informasi publik tahun 2024 sebesar Rp. 100.000.000,- mencakup beberapa komponen berikut :

1. Pemeliharaan website sebagai sarana pelayanan informasi
2. Biaya rapat koordinasi untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik

## BAB III

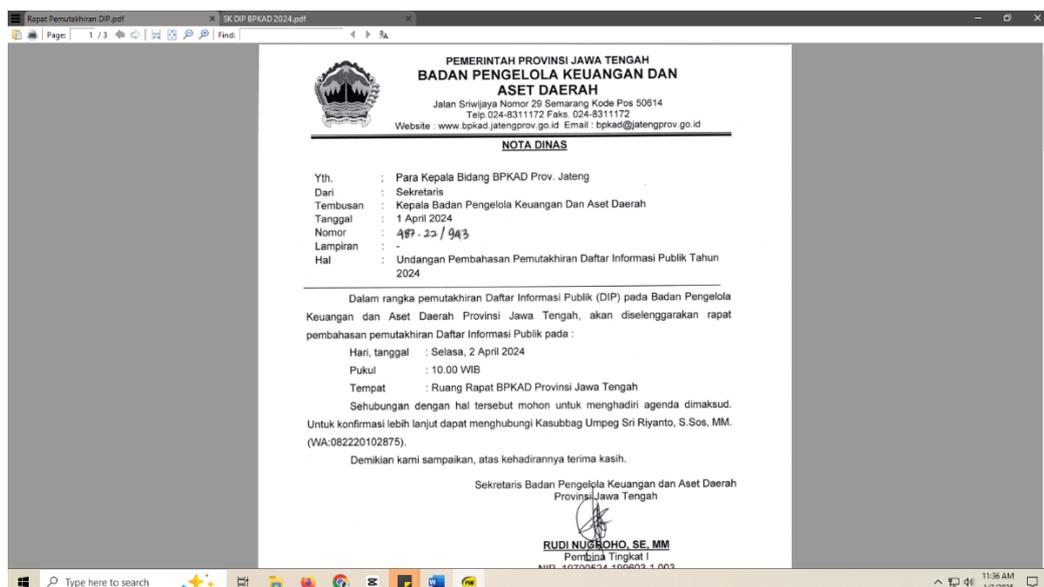
### RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Pelaksanaan pelayanan informasi publik merupakan implementasi nyata dari komitmen BPKAD Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam upaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, pelayanan informasi publik dirancang agar mudah diakses, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan pemohon informasi. Adapun pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2024 meliputi :

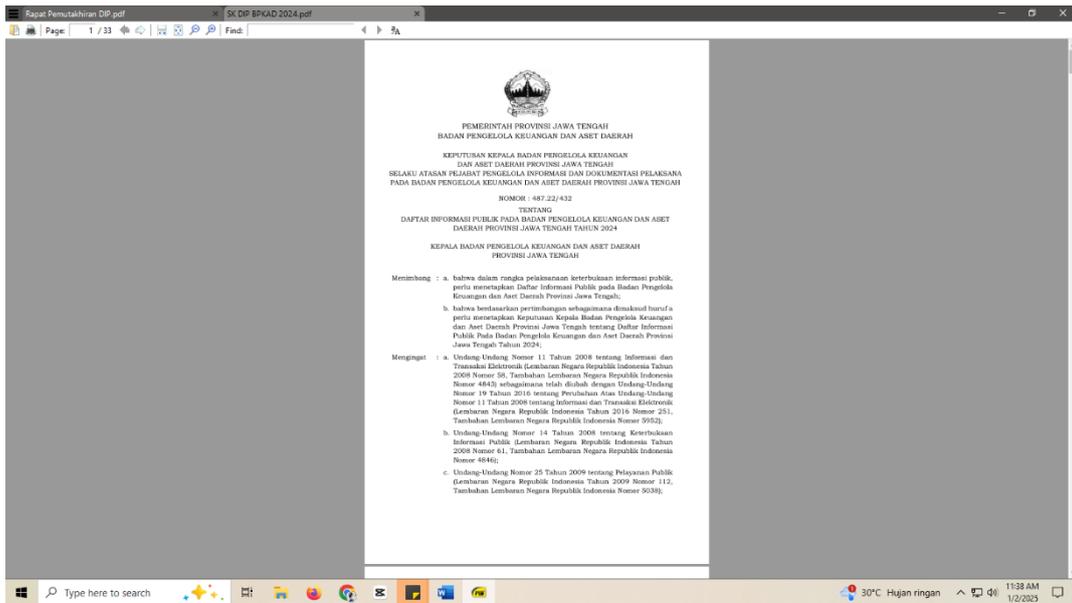
#### 1. Kegiatan yang Telah Dilaksanakan

##### a. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

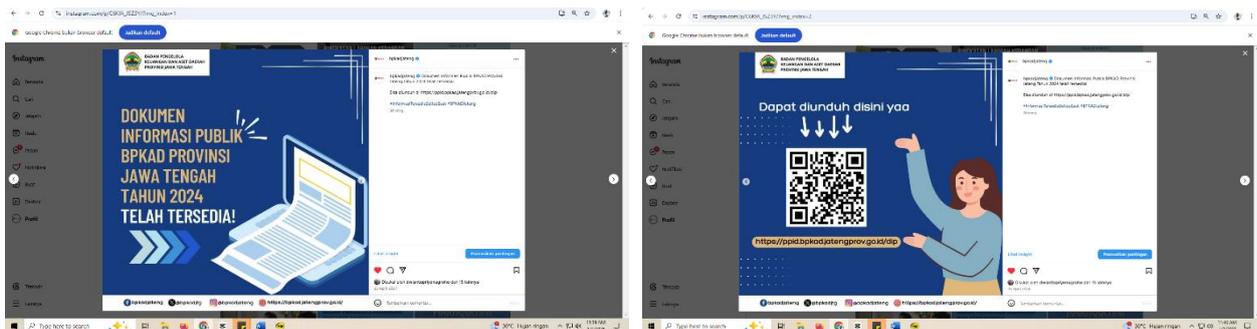
Rapat pemutakhiran DIP telah dilaksanakan pada tanggal 2 April 2024 dan telah dihasilkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Atasan Pejabat PPID BPKAD Provinsi Jawa Tengah nomor 487.22/432 tanggal 16 April 2024 tentang Daftar Informasi Publik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.



#### Dokumentasi Undangan Rapat Pemutakhiran DIP



## SK Daftar Informasi Publik BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



### Dokumentasi Publikasi SK DIP

[https://www.instagram.com/p/C6KfA\\_JSZ3Y/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/p/C6KfA_JSZ3Y/?img_index=1)

#### b. Uji Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Uji Konsekuensi Publik telah dilaksanakan pada 13 April 2024 di Ruang Rapat BPKAD Provinsi Jawa Tengah dihadiri oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, dan akademisi dari Universitas Sultan Agung Semarang. Pada uji konsenkuensi tersebut diusulkan 11 daftar informasi yang akan dikecualikan, dan disepakati ada 3 informasi yang dikecualikan.

**BERITA ACARA PENGUJIAN KONSEKUENSI  
TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024  
NOMOR : 360/463**

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Semarang telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik pada tabel di bawah ini :

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi atau Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum selesai proses pengadaan barang dan jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 2	a. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan intelektual b. Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat c. Mengungkap rahasia dagang	a. Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan intelektual b. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat c. Melindungi rahasia dagang	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
2.	Dokumen Penawaran	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan intelektual	Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan intelektual	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
3.	Sertifikat tanah aset Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Jawa Tengah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d dan huruf j	Penyalahgunaan dalam penggunaan kepentingan pribadi atau kelompok	Pengamanan dan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Seesa kebutuhan, kecuali perintah aparat penegak hukum

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Dr. UMAR MARUF, S.H., Sp.N., M.Hum.	Akademisi	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	
2.	ZRPTJ MULYONO, SH, MH	Analisis Hukum Ahli Madya	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah	
3.	MASHURI, S.T., M.T.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	
4.	RUDI NUGROHO, S.E., M.M.	Sekretaris	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
5.	SANADI, S.E., M.Ak.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
6.	DEASY RINA W, S.E., M.Si.	Kepala Bidang Akuntansi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
7.	DWIMANTO PRIONUGROHO, M.Prof.Ac	Kepala Bidang Anggaran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
8.	ADI RAHARJO, S.STP, M.Si.	Kepala Bidang Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
9.	SRI RIYANTO, S.Sos., M.M.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
10.	FEBRIAN CAHYO P, S.E., M.M., M.Ak.	Kasubbag Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
11.	OKY HARISS S, S.STP, M.M	Kasubbag Program	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
12.	Dra. DYAH SRI MARWATI, M.H.	Kepala UPAD Boyolali	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

Slamet Ak  
Kepala Utama Muda  
NIP. 19500215 198503 1 001

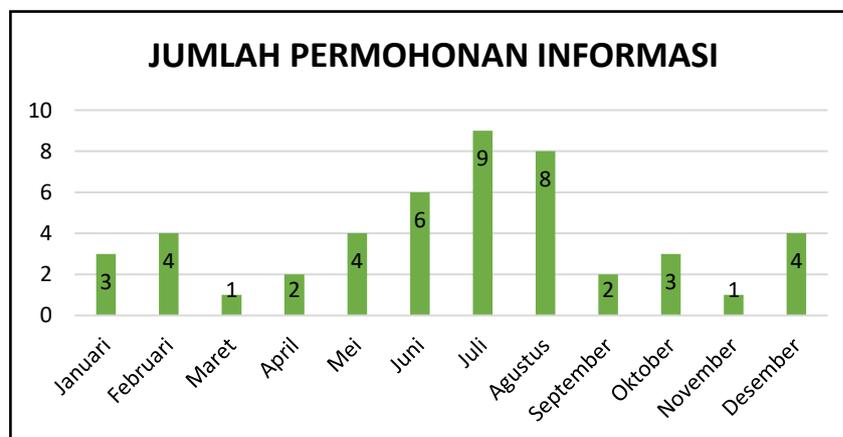
## Dokumentasi Berita Acara Uji Konsekuensi Publik

c. Rapat rutin pembuatan konten informasi, monev permohonan informasi dan aduan

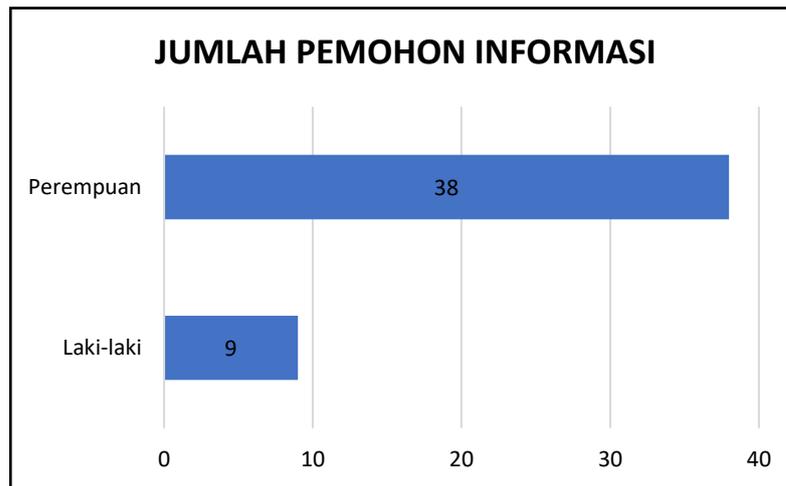
- Rapat Evaluasi dan Perencanaan Publikasi Program dan kegiatan BPKAD pada tanggal 31 Mei 2024
- Rapat monitoring dan evaluasi aduan semester I tahun 2024 pada tanggal 25 Juli 2024
- Rapat evaluasi PPID dan perencanaan publikasi program dan kegiatan BPKAD Provinsi Jawa Tengah TW IV Tahun 2024 pada tanggal 10 Oktober 2024
- Rapat koordinasi pengumpulan data dukung pengisian konten pada website BPKAD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 November 2024
- Rapat persiapan uji publik pada tanggal 19 November 2024
- Rapat monitoring dan evaluasi aduan masyarakat semester II tahun 2024 pada tanggal 26 November 2024

## 2. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama tahun 2024, BPKAD Provinsi Jawa Tengah telah menerima **47 permohonan informasi**. Pemohon informasi terdiri dari mahasiswa, ASN, dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi publikpun beragam seperti untuk kebutuhan penelitian, kebutuhan administrasi ASN dan masyarakat yang ingin tahu terkait alokasi anggaran sektor tertentu di daerah Kabupaten/Kota nya masing-masing. Adapun rincian pemohon informasi kurun waktu Januari – Desember 2024 sebagai berikut :



**Jumlah pemohon informasi per bulan**



**Jenis kelamin pemohon informasi**

### 3. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata **4 hari kerja** dalam memenuhi informasi publik.

Adapun rincian waktu pemohon informasi sebagai berikut :

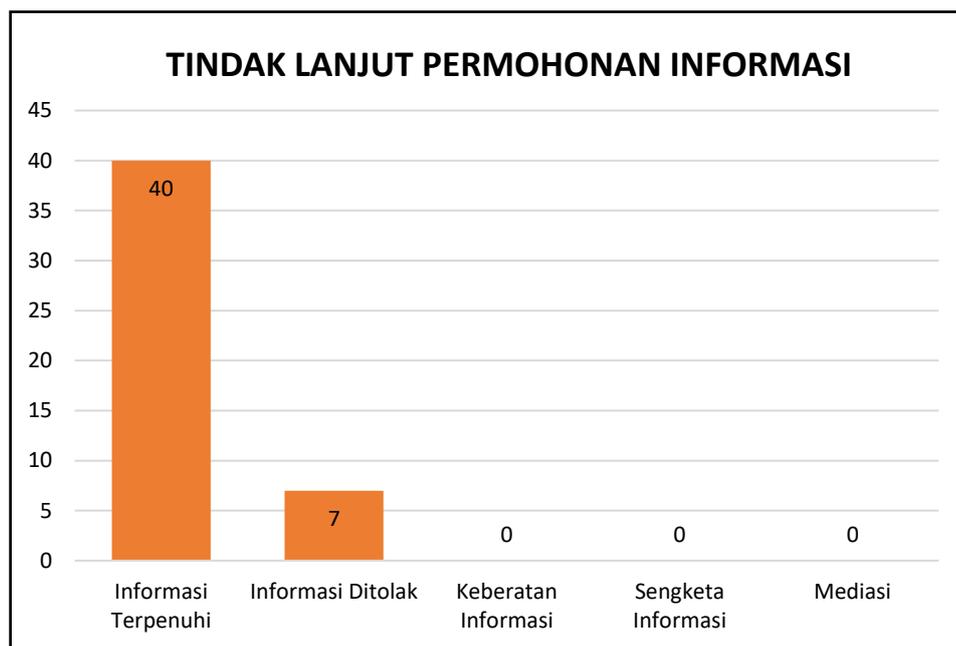
No	Tanggal Permohonan Informasi	Nama	Tindak Lanjut	Waktu Tindak Lanjut
1	5 Januari 2024	Sidiq Aji Pamungkas	Sudah Ditindaklanjuti	5 Januari 2024
2	10 Januari 2024	Khumai Fatkhan	Sudah Ditindaklanjuti	16 Januari 2024
3	25 Januari 2024	Meysy Ike Dewi Lestari	Sudah Ditindaklanjuti	1 Februari 2024
4	01 Februari 2024	Bejo Rahayu	Sudah Ditindaklanjuti	7 Februari 2024
5	07 Februari 2024	Zainurohmah	Sudah Ditindaklanjuti	12 Februari 2024
6	07 Februari 2024	Reizka Putri Shefina	Sudah Ditindaklanjuti	20 Februari 2024
7	15 Februari 2024	Monica Divani Wulan Agustina	Sudah Ditindaklanjuti	20 Februari 2024
8	26 Maret 2024	Mulia	Sudah Ditindaklanjuti	3 April 2024
9	13 April 2024	Jeremy Christian Muwardi	Sudah Ditindaklanjuti	18 April 2024
10	15 April 2024	Muhammad Miftakhul Rozaq	Sudah Ditindaklanjuti	18 April 2024

<b>No</b>	<b>Tanggal Permohonan Informasi</b>	<b>Nama</b>	<b>Tindak Lanjut</b>	<b>Waktu Tindak Lanjut</b>
11	8 Mei 2024	Edelia Putri Azzahro	Ditolak karena tidak dikuasai	13 Mei 2024
12	15 Mei 2024	Ella Arista	Ditolak karena tidak dikuasai	15 Mei 2024
13	16 Mei 2024	Husnul Fitriana	Sudah Ditindaklanjuti	17 Mei 2024
14	18 Mei 2024	Ersa Fadilansah	Sudah Ditindaklanjuti	20 Mei 2024
15	6 Juni 2024	Fadhilatul munawaroh	Sudah Ditindaklanjuti	6 Juni 2024
16	6 Juni 2024	Diaz Aprillian	Sudah Ditindaklanjuti	13 Juni 2024
17	12 Juni 2024	Arista hidayati	Sudah Ditindaklanjuti	13 Juni 2024
18	12 Juni 2024	Cici Dwijayanti	Sudah Ditindaklanjuti	13 Juni 2024
19	21 Juni 2024	Diaz Aprillian	Sudah Ditindaklanjuti	25 Juni 2024
20	26 Juni 2024	Windasari utami	Ditolak karena tidak dikuasai	28 Juni 2024
21	3 Juli 2024	Siti Ita Rosita	Sudah Ditindaklanjuti	8 Juli 2024
22	3 Juli 2024	Ribkah Feani	Sudah Ditindaklanjuti	9 Juli 2024
23	4 Juli 2024	Patria Nurmala Oktafia	Sudah Ditindaklanjuti	8 Juli 2024
24	4 Juli 2024	Riska Martiana	Sudah Ditindaklanjuti	8 Juli 2024
25	8 Juli 2024	Amanda Bela	Sudah Ditindaklanjuti	9 Juli 2024
26	11 Juli 2024	Aninda Eka Setiana	Sudah Ditindaklanjuti	12 Juli 2024
27	15 Juli 2024	Deni Setiawan	Sudah Ditindaklanjuti	18 Juli 2024
28	16 Juli 2024	NGAFWAH MUZAYANAH	Ditolak karena tidak dikuasai	18 Juli 2024

<b>No</b>	<b>Tanggal Permohonan Informasi</b>	<b>Nama</b>	<b>Tindak Lanjut</b>	<b>Waktu Tindak Lanjut</b>
29	29 Juli 2024	Hilda Hidayah	Ditolak karena tidak dikuasai	30 Juli 2024
30	3 Agustus 2024	Settyas Tedy Andrassukma	Sudah Ditindaklanjuti	7 Agustus 2024
31	9 Agustus 2024	Hana	Ditolak karena tidak dikuasai	9 Agustus 2024
32	16 Agustus 2024	Agnes Felicia	Sudah Ditindaklanjuti	21 Agustus 2024
33	19 Agustus 2024	Dina Ameliya	Sudah Ditindaklanjuti	20 Agustus 2024
34	19 Agustus 2024	Eka Fajar Nur Agustin	Sudah Ditindaklanjuti	20 Agustus 2024
35	23 Agustus 2024	Landung Aji Pradana	Sudah Ditindaklanjuti	23 Agustus 2024
36	29 Agustus 2024	Alfina Yuniar Prastika	Sudah Ditindaklanjuti	30 Agustus 2024
37	29 Agustus 2024	DIVA AULIA NURFITRIANI	Sudah Ditindaklanjuti	30 Agustus 2024
38	23 September 2024	Nova Intan Kurniasari	Sudah Ditindaklanjuti	27 September 2024
39	27 September 2024	Agtri Mahardika	Sudah Ditindaklanjuti	2 Oktober 2024
40	2 Oktober 2024	Wanda Nur Halimah	Sudah Ditindaklanjuti	17 Oktober 2024
41	16 Oktober 2024	Yogi Febiyanto	Sudah Ditindaklanjuti	21 Oktober 2024
42	29 Oktober 2024	Sayekti Arta Anggraeni	Sudah Ditindaklanjuti	1 November 2024
43	24 November 2024	Kartika Nur Asifa	Sudah Ditindaklanjuti	25 November 2024
44	6 Desember 2024	Anis Rahmawati	Ditolak karena tidak dikuasai	27 Desember 2024
45	9 Desember 2024	Salsabilla Mulia	Sudah Ditindaklanjuti	19 Desember 2024
46	12 Desember 2024	Nina Adelina	Sudah Ditindaklanjuti	23 Desember 2024
47	19 Desember 2024	Wuryandini	Sudah Ditindaklanjuti	23 Desember 2024

#### 4. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak

Dari 47 pemohon informasi terdapat **40 permohonan informasi yang terpenuhi dan 7 permohonan informasi yang ditolak** karena tidak dikuasai Badan Publik. Selain itu, pada tahun 2024 **tidak ada pemohon informasi yang mengajukan keberatan informasi maupun sengketa informasi** di BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Berikut merupakan rincian tindak lanjut permohonan informasi di BPKAD Provinsi Jawa Tengah kurun waktu Januari – Desember 2024 :



**Tindak lanjut permohonan informasi**

Selanjutnya untuk permohonan informasi yang ditolak tersebut diarahkan agar pemohon informasi untuk mengajukan permohonan informasi pada instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dan sesuai dengan jenis informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Adapun daftar informasi yang ditolak karena tidak dikuasai adalah sebagai berikut :

1. Data belanja daerah fungsi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berdasarkan kab/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2015 – 2023 (diarahkan ke Kabupaten/kota yang dituju)

2. Permohonan informasi terkait nomor PBB dan pergantian nama SPPT pada PBB (diarahkan ke Kabupaten/Kota yang dituju)
3. Data Aset Tetap tahun 2020-2023 dan Data Neraca Tahun 2020-2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal (Diarahkan ke Kabupaten/Kota yang dituju)
4. Pengajuan keberatan untuk Harga NJOP per meter di dalam PBB (diarahkan ke Kabupaten/Kota yang dituju)
5. Data Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur 2016 -2023 dan data Pendapatan Asli Daerah Per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2016 – 2023 (diarahkan ke Kabupaten/Kota yang dituju).

## **BAB IV**

### **KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024**

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, BPKAD Provinsi Jawa Tengah tentu belum berjalan sempurna dan masih menghadapi kendala. Hal tersebut yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik selama ini. Kendala-kendala ini perlu untuk diidentifikasi dan dikelola dengan baik untuk memastikan pelayanan informasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Beberapa kendala utama yang dihadapi oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah meliputi :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang terbatas menjadi salah satu tantangan utama dalam pelayanan informasi publik. Dengan cakupan tugas yang luas dan kebutuhan pelayanan informasi yang terus meningkat, SDM yang ada sering kali harus menangani beban kerja yang melampaui kapasitasnya. Selain itu, beban tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang tidak selalu relevan dengan pelayanan informasi menyebabkan proses penyampaian informasi kurang maksimal.

2. Waktu Penyampaian Jawaban yang Belum Sesuai Target

Salah satu kendala operasional adalah waktu penyampaian jawaban atas permohonan informasi yang terkadang melampaui target. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan respon dari unit kerja terkait, baik karena proses pengumpulan data yang memakan waktu maupun koordinasi antar-unit yang belum optimal.

3. Pengelolaan Arsip dan Data Lama yang Belum Optimal

Pengelolaan arsip dan data lama masih menjadi tantangan, terutama pada dokumen-dokumen yang belum diarsipkan dengan baik. Hal ini menyulitkan petugas untuk menemukan dan menyediakan informasi tertentu secara cepat karena membutuhkan waktu untuk mencari dan mendokumentasikan dokumen yang dibutuhkan. Ketidaktersediaan

database terstruktur juga menambah kompleksitas dalam memenuhi permohonan informasi.

#### 4. Keterbatasan Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan informasi publik masih terbatas. Keterbatasan ini berdampak pada beberapa aspek, seperti:

- a. Pengadaan sarana dan prasarana yang kurang optimal (salah satunya adalah belum adanya aplikasi mobile pelayanan informasi)
- b. Pengembangan kapasitas SDM yang belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
- c. Keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait keterbukaan informasi kepada pegawai internal BPKAD

#### 5. Kurangnya Pemahaman SDM terkait PPID

Sebagian SDM yang bertugas belum sepenuhnya memahami peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini menyebabkan kurangnya responsivitas dan kualitas pelayanan informasi. Pemahaman yang terbatas ini juga memengaruhi kemampuan petugas dalam mengelola informasi, menangani sengketa informasi, dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan.

## **BAB V**

### **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Penguatan kapasitas SDM
  - a. Melaksanakan pelatihan terkait pengelolaan informasi publik dan tugas PPID
  - b. Menyusun pedoman internal yang memudahkan SDM dalam menjalankan tugas pelayanan informasi
2. Optimalisasi Anggaran
  - a. Mengutamakan anggaran untuk pengadaan teknologi, pengembangan SDM dan sosialisasi
  - b. Melakukan efisiensi pada komponen operasional untuk memaksimalkan penggunaan anggaran
3. Penguatan Koordinasi Antar Unit Kerja
  - a. Menyusun prosedur SOP yang memperjelas alur koordinasi antar unit kerja
  - b. Melakukan percepatan penyelesaian permohonan informasi
  - c. Melaksanakan evaluasi berkala antar unit kerja terkait pelayanan informasi
4. Sosialisasi dan Edukasi
  - a. Melaksanakan program literasi informasi untuk meningkatkan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik bagi pegawai internal BPKAD
  - b. Memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk memperlluas jangkauan sosialisasi program kegiatan BPK

**LAMPIRAN**

**REKAPITULASI LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang Diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket
							KI	PTUN	MA	
1	Januari	3	4	3	0	0	0	0	0	
2	Februari	4	5	4	0	0	0	0	0	
3	Maret	1	5	1	0	0	0	0	0	
4	April	2	4	2	0	0	0	0	0	
5	Mei	4	2	2	2	0	0	0	0	Ditolak karena tidak dikuasai
6	Juni	6	2	5	1	0	0	0	0	Ditolak karena tidak dikuasai
7	Juli	9	3	7	2	0	0	0	0	Ditolak karena tidak dikuasai
8	Agustus	8	2	7	1	0	0	0	0	Ditolak karena tidak dikuasai
9	September	2	4	2	0	0	0	0	0	
10	Oktober	3	6	3	0	0	0	0	0	
11	November	1	2	1	0	0	0	0	0	
12	Desember	4	8	3	1	0	0	0	0	Ditolak karena tidak dikuasai
	<b>Jumlah</b>	<b>47</b>		<b>40</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
PPID PELAKSANA BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH  
JANUARI – DESEMBER 2024**

NO	HARI/TGL	NAMA	ALAMAT	NOMOR KONTAK	INFORMASI YG DIMINTA	JAM MASUK	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI		BENTUK INFORMASI YANG DIKUASAI		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN PPID	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN		
								DIBAWAH PENGUASAAN		BELUM DIKUASAI	SOFTCOPY	HARDCOPY	MELIHAT/ MENGETAHUI			MEMINTA SALINAN	PEMBERITAHUAN TERTULIS	PEMBERIAN INFORMASI	BIAYA	CARA
								Ya	Tdk											
1	5 Januari 2024	Sidiq Aji Pamungkas			Cara kerjasama peminjaman tempat asrama haji untuk kegiatan sekolah	11:20:51	Untuk kegiatan Pesantren Ramadhan sekolah SMA Batik 1 SKA di Asrama Haji Donohudan	V	-	-	V	-	V	-	TERPENUHI	-	5 Januari 2024	5 Januari 2024	GRATIS	WA
2	10 Januari 2024	Khumai Fatkhan			Informasi mengenai lelang aset daerah yang ada di provinsi Jawa Tengah	11:30:35	ingin ikut serta menjadi penawar lelang	V	-	-	V	-	V	-	TERPENUHI	-	10 Januari 2024	16 Januari 2024	GRATIS	EMAIL
3	25 Januari 2024	Meysy lke Dewi Lestari			Data laporan realisasi anggaran tahun 2008-2012	-	Digunakan untuk mengerjakan tugas akhir yaitu skripsi	V	-	-	V	-	V	-	TERPENUHI	-	25 Januari 2024	1 Februari 2024	GRATIS	EMAIL
4	01 Februari 2024	Bejo Rahayu			Kami Mohon Info Terkait SKKP an Suyamto yang pensiun Per 1 Februari 2024, kok sampai sekarang belum kami terima, padahal biasanya satu bulan sebelum TMT pensiun sudah turun,	09:40:55	Untuk mengurus TASPEN	V	-	-	V	-	V	-	TERPENUHI	-	01 Februari 2024	7 Februari 2024	GRATIS	EMAIL
5	07 Februari 2024	Zainurohmah			Perda Jateng No. 11 Tahun 2023	14:52:14	Salah satu data yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi tentang Perda Jateng yang diundangkan pada Tahun 2023.	V	-	-	V	-	V	-	TERPENUHI	-	07 Februari 2024	12 Februari 2024	GRATIS	EMAIL
6	07 Februari 2024	Reizka Putri Shefina			LKPD Provinsi Jateng per 6 Bulanan (per tengah tahunan) periode 2018-2022. (Jika terdapat file yang telah diaudit lebih baik, jika tidak ada juga tidak masalah)	-	Bertujuan sebagai penunjang data tugas akhir yang berjudul "Pengaruh PAD, Belanja Modal, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022)" Dengan demikian, saya berharap mendapatkan informasi mengenai PAD, Belanja Modal, Dana Perimbangan yang terdapat pada LKPD per 6 bulanan (per tengah tahunan) untuk pengolahan data pada tugas akhir	V	-	-	V	-	V	-	TERPENUHI	-	07 Februari 2024	20 Februari 2024	GRATIS	EMAIL

7	15 Februari 2024	Monica Divani Wulan Agustina		Gambaran Umum BPKAD Provinsi Jawa Tengah (Sejarah Singkat, Visi Misi, Struktur Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab), Laporan Keuangan Tahun 2021-2023, Laporan Neraca Komperhensif Tahun 2021-2023, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021-2023, Laporan Operasional Tahun 2021-2023, Data Transaksi Bulan Desember Tahun 2021-2023, Jurnal Transaksi Desember 2021-2023, SKPD Tahun 2021-2023, Buku Kas Pengeluaran dan Penerimaan Tahun 2021-2023.	-	Pinjarm Data guna penelitian untuk Tugas Akhir	V	-	-	V	-	V	-	TERPENUHI	-	15 Februari 2024	20 Februari 2024	GRATIS	EMAIL
8	26 Maret 2024	Mulla		Laporan realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 2020-2022 dan Laporan anggaran APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 2020-2022 (membuat data PAD dan Dana Perimbangan)	09:22:28	Diperlukan untuk menyusun tugas akhir mahasiswa	V	-	-	V	-	V	-	TERPENUHI	-	26 Maret 2024	3 April 2024	GRATIS	EMAIL
9	13 April 2024	Jeremy Christian Muwardi		Informasi Permasalahan Penganggaran di Pemda Jawa Tengah	08:10:39	Untuk memenuhi tugas kuliah pada mata kuliah Praktikum Penganggaran Organisasi Publik	V	-	-	V	-	V	-	TERPENUHI	-	13 April 2024	18 April 2024	GRATIS	EMAIL DAN WA
10	15 April 2024	Muhammad Miftakul Rozaq		Pendaftaran tenaga musiman haji Donohudan	15:43:15	Pendaftaran	V	-	-	V	-	V	-	TERPENUHI	-	15 April 2024	18 April 2024	GRATIS	EMAIL
11	8 Mei 2024	Edelia Putri Azzahro		Data belanja daerah fungsi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berdasarkan kab/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2015 - 2023	-	Skripsi	-	V	V	V	-	V	-	DITOLAK	Informasi Tidak Dikuasai	8 Mei 2024	13 Mei 2024	GRATIS	EMAIL
12	15 Mei 2024	Ella Arista		Jika ingin tahu nomer PBB, apakah bisa melalui online	14:45:36	Untuk membayar PBB	-	V	V	V	-	V	-	DITOLAK	Informasi Tidak Dikuasai	15 Mei 2024	15 Mei 2024	GRATIS	EMAIL DAN WA
13	16 Mei 2024	Husnul Fitriana		untuk memenuhi program wajib magang dari kampus	13:57:24	Memenuhi Program Magang	V	-	-	V	-	V	-	TERPENUHI	-	16 Mei 2024	17 Mei 2024	GRATIS	EMAIL
14	18 Mei 2024	Ersa Fadliansah		Informasi terkait magang mandiri untuk mahasiswa jenjang D4/S1. Apakah BPKAD Jateng membuka kesempatan magang bagi mahasiswa jenjang D4/S1 dan bagaimana mekanisme pelaksanaan magang tersebut jika tersedia. Terima kasih	21:00:02	Untuk melakukan kegiatan magang mandiri jika kegiatan magang mandiri untuk mahasiswa terbuka di BPKAD Jateng	V	-	-	V	-	V	-	TERPENUHI	-	18 Mei 2024	20 Mei 2024	GRATIS	EMAIL
15	6 Juni 2024	Fadhilatul Munawaroh		Informasi magang mandiri bulan Agustus	10:45:57	Mendapat informasi magang	V	-	-	V	-	V	-	TERPENUHI	-	6 Juni 2024	6 Juni 2024	GRATIS	WA
16	6 Juni 2024	Diaz Aprillian		Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) antara lain : Belanja modal Dana perimbangan Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah thn 2018-2022	10:59:37	Untuk menyelesaikan tugas skripsi	V	-	-	V	-	V	-	TERPENUHI	-	6 Juni 2024	13 Juni 2024	GRATIS	E-MAIL
17	12 Juni 2024	Arista Hidayati		Magang mandiri	11:50:41	Melakukan magang mandiri	V	-	-	V	-	V	-	TERPENUHI	-	12 Juni 2024	13 Juni 2024	GRATIS	WA
18	12 Juni 2024	Cici Dwijayanti		Pembukaan magang mandiri tahun 2024	12:13:52	Keperluan magang	V	-	-	V	-	V	-	TERPENUHI	-	12 Juni 2024	13 Juni 2024	GRATIS	WA
19	21 Juni 2024	Diaz Aprillian		Data yang dibutuhkan : -Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) antara lain : Belanja modal Dana perimbangan Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah thn 2018-2023	10:31:40	Untuk menyelesaikan skripsi	V	-	-	V	-	V	-	TERPENUHI	-	21 Juni 2024	25 Juni 2024	GRATIS	E-MAIL
20	26 Juni 2024	Windsari Utami		Syarat yang dibutuhkan ganti nama SPPT PBB yang baru dibeli	11:36:54	Untuk pergantian nama sppt	-	V	V	V	-	V	-	DITOLAK	Informasi Tidak Dikuasai	26 Juni 2024	28 Juni 2024	GRATIS	E-MAIL
21	3 Juli 2024	Siti Ita Rosita		Ijin penyebaran kuesioner penelitian untuk penulisan disertasi dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Good Public Governance dan Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran dan Dampaknya kepada Kinerja Pemerintah Daerah	9:43:19	Ijin penyebaran kuesioner penelitian untuk penulisan disertasi dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Good Public Governance dan Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran dan Dampaknya kepada Kinerja Pemerintah Daerah	V	-	-	V	-	V	-	TERPENUHI	-	3 Juli 2024	8 Juli 2024	GRATIS	WA
22	3 Juli 2024	Ribkah Feani		Apakah di BPKAD Prov. Jawa Tengah menerima magang MSIB ataupun magang yang dapat dikonversikan ke nilai?	16:02:11	Apakah di BPKAD Prov. Jawa Tengah menerima magang MSIB ataupun magang yang dapat dikonversikan ke nilai?	V	-	-	V	-	V	-	TERPENUHI	-	3 Juli 2024	9 Juli 2024	GRATIS	EMAIL

23	4 Juli 2024	Patria Nurmala Oktafia	Informasi terkait magang	12:17:08	Informasi terkait magang	V	-	-	V	-	V	-	TERPENUHI	-	4 Juli 2024	8 Juli 2024	GRATIS	E-MAIL
24	4 Juli 2024	Riska Martiana	Informasi Terkait Magang	12:24:28	Buat Menyelesaikan Tugas Mata Kuliah	V	-	-	V	-	V	-	TERPENUHI	-	4 Juli 2024	8 Juli 2024	GRATIS	E-MAIL
25	8 Juli 2024	Amanda Bela	Persyaratan pengajuan magang dan kebutuhan posisi serta waktu yang belum terisi	16:46:17	Untuk keperluan mengajukan magang	V	-	-	V	-	V	-	TERPENUHI	-	8 Juli 2024	9 Juli 2024	GRATIS	E-MAIL
26	11 Juli 2024	Aninda Eka Setiana	Informasi magang pada bidang terkait	8:26:49	Saya Aninda Eka Setiana, Mahasiswa Semester 6 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang. Saya ingin mengajukan magang pada bagian terkait untuk melengkapi KRS saya dibidang Praktek Kerja Lapangan. Terimakasih banyak dan besar harapan saya untuk ketersediaannya.	V	-	-	V	-	V	-	TERPENUHI	-	11 Juli 2024	12 Juli 2024	GRATIS	E-MAIL
27	15 Juli 2024	Deni Setiawan	terkait berita di media sosial mengenai tunjangan uang makan bagi ASN apakah benar atau tidak rencana tersebut. Jika rencana pemberian tunjangan uang makan ASN tersebut memang benar, kira-kira kapan tunjangan tersebut dapat di terima oleh ASN	15:00:07	keperluan pribadi	V	-	-	V	-	V	-	TERPENUHI	-	15 Juli 2024	18 Juli 2024	GRATIS	E-MAIL
28	16 Juli 2024	Ngafwah Muzaynah	Bagaimana jika seseorang membeli tanah saya tetapi saat dibuat sppt malah hanya balik nama yg mengakibatkan saya tidak punya SPPT serta luasnya menjadi milik yang lain padahal tidak dibeli sepenuhnya	06:12:17	Petugas tidak benar dalam bekerja yang mengakibatkan saya tidak memiliki SPPT	-	V	V	V	-	V	-	DITOLAK	Informasi Tidak Dikuasai	16 Juli 2024	18 Juli 2024	GRATIS	E-MAIL
29	29 Juli 2024	Hilda Hidayah	1. Data Aset Tetap tahun 2020-2023 pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal 2. Data Neraca Tahun 2020-2023 pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal	15:21:31	Dibutuhkan sebagai data penelitian untuk menyelesaikan Tugas Akhir	-	V	V	V	-	V	-	DITOLAK	Informasi Tidak Dikuasai	29 Juli 2024	30 Juli 2024	GRATIS	E-MAIL
30	3 Agustus 2024	Settyas Tedy Andrassukma	Ibu sy pensiun per 1 Agustus 2024, mengapa SKPPnya belum turun? A.n. Istyas Endang Sri Astuti, Guru SMA N 1 Gombang	14:55:48	Menanyakan kepastian	V	-	-	-	-	V	-	TERPENUHI	-	3 Agustus 2024	7 Agustus 2024	GRATIS	E-MAIL
31	9 Agustus 2024	Hana	Mau konsultasi : Saya mau mengajukan keberatan untuk Harga NIOp per meter di dalam PBB untuk lokasi bangunan yang terletak di bagian luar/dekat jalan dan di bagian dalam mengapa disamaratakan harga NIOp nya , Jadi, yg saya tanyakan adalah surat permohonan keberatan Pembayaran PBB atau Surat Keringanna Pembayaran? Mohon petunjuk nya. trmksi pak/bu	13:49:14	Untuk pembayaran PBB Tahunan	-	V	V	-	-	V	-	DITOLAK	Informasi Tidak Dikuasai	9 Agustus 2024	9 Agustus 2024	GRATIS	E-MAIL
32	16 Agustus 2024	Agnes Felicia	Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan dan Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2013-2023	10:06:47	Digunakan untuk data Tugas Akhir Skripsi	V	-	-	-	-	V	-	TERPENUHI	-	16 Agustus 2024	21 Agustus 2024	GRATIS	E-MAIL
33	19 Agustus 2024	Dina Ameliya	Surat tembusan magang	14:18:50	Untuk PKL	V	-	-	-	-	V	-	TERPENUHI	-	19 Agustus 2024	20 Agustus 2024	GRATIS	E-MAIL
34	19 Agustus 2024	Eka Fajar Nur Agustin	Syarat tembusan magang	14:20:11	Untuk PKL	V	-	-	-	-	V	-	TERPENUHI	-	19 Agustus 2024	20 Agustus 2024	GRATIS	E-MAIL
35	23 Agustus 2024	Landung Aji Pradana	Realisasi APBD Kab/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2021 s.d 2023	11:44:49	Penelitian skripsi	V	-	-	-	-	V	-	TERPENUHI	-	23 Agustus 2024	23 Agustus 2024	GRATIS	WA
36	29 Agustus 2024	Alfina Yuniar Prastika	Informasi Seputar Magang dan Kouta Magang Periode Bulan Oktober-Desember	11:17:32	Pengajuan Magang	V	-	-	-	-	V	-	TERPENUHI	-	29 Agustus 2024	30 Agustus 2024	GRATIS	E-MAIL
37	29 Agustus 2024	DIVA AULIA NURFITRIANI	Informasi mengenai magang khususnya kuota dan periode magang dibulan oktober-desember	11:17:34	Untuk pengajuan magang	V	-	-	-	-	V	-	TERPENUHI	-	29 Agustus 2024	30 Agustus 2024	GRATIS	E-MAIL
38	23 September 2024	Nova Intan Kurniasari	Jalan Gunungsari Rt 03/Rw 09, Jomblang, Candisari	13:37:42	Pemenuhan tugas mata kuliah Isu dan Kebijakan Otonomi Daerah tentang "Mempelajari transparansi anggaran dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah"	V	-	-	-	-	V	-	TERPENUHI	-	23 September 2024	27 September 2024	GRATIS	E-MAIL
39	27 September 2024	Agtri Mahardika	Desa Kabuh	19:48:18	untuk penelitian tugas akhir skripsi universitas trunojoyo madura	V	-	-	-	-	V	-	TERPENUHI	-	27 September 2024	2 Oktober 2024	GRATIS	E-MAIL
40	2 Oktober 2024	Wanda Nur Halimah	Argasoka	14:29:40	untuk penelitian (skripsi)	V	-	-	-	-	V	-	TERPENUHI	-	2 Oktober 2024	17 Oktober 2024	GRATIS	E-MAIL
41	16 Oktober 2024	Yogi Febiyanto	Jalan ganesha utara III blok B pedurungan	15:22:08	untuk penelitian guna mendapat gelar sarjana akuntansi	V	-	-	-	-	V	-	TERPENUHI	-	16 Oktober 2024	21 Oktober 2024	GRATIS	E-MAIL

42	29 Oktober 2024	Sayekti Arta Anggraeni		Lingkungan Ngempon RT 07/RW 05, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang	10:47:07	Untuk keperluan penelitian skripsi	V	-	-	-	-	V	-	TERPENUHI	-	29 Oktober 2024	1 November 2024	GRATIS	E-MAIL
43	24 November 2024	Kartika Nur Asifa		Gg. Melati No. 21-22, Jalan Nirwanasari, Banjarsari, Tembalang, Semarang	13:49:13	Untuk penelitian skripsi	V	-	-	-	-	V	-	TERPENUHI	-	24 November 2024	25 November 2024	GRATIS	E-MAIL
44	6 Desember 2024	Anis Rahmawati		Karanganyar	17:13:42	Keperluan skripsi	-	V	V	-	-	V	-	DITOLAK	Informasi Tidak Dikuasai	6 Desember 2024	27 Desember 2024	GRATIS	E-MAIL
45	9 Desember 2024	Salsabila Mulia		Krapyak Lor GG 3-19	13:37:14	Pembuatan Laporan	V	-	-	-	-	V	-	TERPENUHI	-	9 Desember 2024	19 Desember 2024	GRATIS	E-MAIL
46	12 Desember 2024	Nina Adelina		Jl. calen II No. 17 Jombor Sukoharjo	08:45:45	Gelar pendidikan S2 (M.Pd.) belum tercantum pada daftar gaji bulan Desember 2024	V	-	-	-	-	V	-	TERPENUHI	-	12 Desember 2024	23 Desember 2024	GRATIS	E-MAIL
47	19 Desember 2024	Wuryandini		Jl. R.A. Kartini No.39, RW.6	13:49:13	Untuk penelitian skripsi	V	-	-	-	-	V	-	TERPENUHI	-	19 Desember 2024	23 Desember 2024	GRATIS	E-MAIL